

KERAGAAN PEMBIAYAAN USAHATANI TERNAK SAPI

Sugiarto¹⁾ dan Adri²⁾

¹⁾ Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Pertanian, Bogor

²⁾ Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi

ABSTRACT

The necessity of capital for the community in village, especially livestock of farmer is very important to sustainable farm. Nevertheless, the problem of low capital will always appear to increase farm and income. So that, the reseach that give information about financing farm performance of livestock. Research show, that the acces of farmer to get credit which comes from formal institution financing, in fact that it doesn't give any credit for livestock farmer. Besides that, the frequency of borrowing and values are still low. At first, cost of transaction is epected to become burden for the credit, it doesn't have any influence to the borrower. It is because the screening, delivery, and the pattern of incentive, also enforcement, application form which have been applied by formal financing institution is good enough and easy to understand by the farmer who want to access them. Although farmer aspiration to the formal institution financing which is expected without difficult procedure, on time, exact in the quantity but also with requirement for borrowing application which is cheap. To make it cheap and easy for farmer to acces formal institution financing, that will be better if make Micro Finance Institution (Lembaga Keuangan Mikro) in the village which can bridge the credit for agriculture. In this condition we hope that it can solve the limits of capital and it can increase farm agriculture and society income.

Key word: *Finnacing, Farm, Livestock*

PENDAHULUAN

Sebagai langkah didalam peningkatan produksi dan pendapatan sektor pertanian, pemerintah telah melakukan kebijakan guna menanggulangi permasalahan permodalan, dimana pada awalnya dalam bentuk program yang terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian, yang diberikan secara massal. Akan tetapi dalam perkembangannya dengan pemberian kredit masal dengan tingkat bunga bersubsidi, menimbulkan polemik yang berkepanjangan karena berbagai penyimpangan (Syukur, *et al.*, 2003).

Dari pengalaman pemberian kredit secara masal, seperti terpuruknya kegiatan KUD (Koperasi Unit Desa) yang menyalurkan KUT (Kredit Usaha Tani), maka dalam pembangunan ekonomi peternakan di pedesaan diperlukan dukungan pemerintah dalam segi kebijakan. Utamanya pada aspek kelembagaan maupun perundangan-undangan, serta menciptakan kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha pertanian, dan menciptakan lembaga pembiayaan yang kuat dan sehat. Bagi peternak untuk memperoleh kredit, biasanya memanfaatkan keberadaan sumber pembiayaan formal dan non formal dengan berbagai konsekuensinya. Walaupun didalam mengakses pada sumber pembiayaan, utamanya pada sumber pembiayaan formal masih rendah, karena berbagai bentuk birokrasi dan persyaratan yang konvensional yang selama ini menjadikan polemik tersendiri untuk memperoleh sumber modal yang murah dan mudah.

Tujuan dari pada tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang keragaan sumber pembiayaan dan keadaan peternak sapi potong yang mengakses sumber pembiayaan untuk memperoleh modal didalam menjalankan kegiatan usahatani.

BAHAN DAN METODE

Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan peternak sapi yang akses kesumber pembiayaan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan Kabupaten Polmas, Provinsi Sulawesi Selatan. Data sekunder dikumpulkan dari instansi Pemerintah Daerah TK I dan II, Studi Pustaka yang ada kaitannya dengan kegiatan penelitian. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi, selain pertimbangan aspek teknis produksi, juga didasarkan atas pertimbangan banyaknya skim kredit, baik dari lembaga pembiayaan formal maupun non formal dan kegiatan program yang diintroduksikan di wilayah tersebut.

Pemilihan responden dilakukan secara random sampling sejumlah 25 peternak yang akses kesumber pembiayaan formal dan non formal, jumlah lembaga pembiayaan dipilih 3 sumber pembiayaan lembaga formal (perbankan) dan 3 sumber pembiayaan lembaga non formal. Dari data yang dikumpulkan akan diolah dan analisis dengan menggunakan metoda analisis deskriptif-analitik dengan menampilkan tabulasi tunggal dan silang terhadap setiap aspek yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pembiayaan Peternakan Di daerah Penelitian

Pada Tabel 1. memperlihatkan bahwa skim kredit di Sulawesi Selatan berupa Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), baik melalui APBD I Sulsel maupun APBD II , dengan pengelolaan secara individu ataupun kelompok untuk kegiatan penggemukan sapi dan sapi potong. Sedangkan tingkat bunga kredit BPLM yang sumbernya berasal dari APBD I dan BPD tidak dikenakan bunga pinjaman dan jangka waktu pengembalian selama 2 tahun. Sedang KKP merupakan program pemerintah untuk membantu permodalan bidang peternakan dengan bank pelaksana BPD dan BNI 46. Sedangkan jumlah kredit yang disalurkan sampai senilai 1,5 milyar, yang terdiri dari kredit penggemukan sapi senilai Rp 1,1 miliar dan Rp 383 juta sapi potong. Sementara di daerah penelitian Kabupaten Polmas senilai Rp 135 juta rupiah (8,5 %). Rendahnya penyaluran kredit tersebut diebakkan karena : 1) pada umumnya permohonan kredit diajukan oleh kolompok pemula, yang diragukan keberhasilan usahanya, 2) belum adanya agunan/jaminan dari kelompok sesuai kredit yang diinginkan.

Di Propinsi Lampung masalah permodalan bagi peternak sapi diupayakan melalui Program Ketahanan Pangan (PKP), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), maupun dari APBD I. dan II. Adapun bank pelaksana yang telah merealisasikan kreditnya adalah bank Lampung, bank Niaga dan bank Mandiri. Dari seluruh plafon yang berada di Bank pelaksana senilai Rp 2,5 miliar, realisasi dana kredit yang dimanfaatkan senilai Rp 888,7 juta atau sekitar 34,8 persen (Tabel 2). Selain melalui perbankan penyaluran kredit juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan kelompok usaha peternakan dalam bidang penggemukan dengan sistem bagi hasil dari pertambahan nilai berat badan (Tabel 3).

Tabel 1. Keragaan penyaluran kredit dan bantuan langsung masyarakat ternak sapi di Sulawesi Selatan, 2003.

Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp 000)	Bunga (%/Th)	Jangka Waktu (tahun)	Jenis Kegiatan	Pengelolaan Ternak
A. Penggemukan					
1. APBD I	770,000	0	2	Penggemukan	Kelompok
2. APBD II	10,606	6	2	Penggemukan	Individu
3. BPD (KKP)	120,000	Subsidi		Penggemukan	Kelompok
4. BPD Sul-sel	220,000	0	2	Penggemukan	Kelompok
5. BRI (Kupedes)	50,000	22	2	Penggemukan	Individu
6. BNI (KKP)	25,000	Subsidi		Penggemukan	Kelompok
T o t a l	1,195,606				
B. Sapi Potong					
1. APBD I	220,000	0	2	sapi potong	Kelompok
2. BPD(KKP)	20,000	6	2	sapi potong	Kelompok
3. BNI(KKP)	143,955	Subsidi		sapi potong	Kelompok
T o t a l	383,955				
Jumlah Sulsel	1,579,561				
Penggemukan (%)	75.7				
Sapi Potong (%)	24.3				

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan, 2003

Tabel 2. Penyaluran kredit ketahanan pangan untuk usaha peternakan di Provinsi Lampung, Tahun 2003.

No	Bank Pelaksana	Plafon (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Kelompok Penerima Dana
1	Bank Lampung	154000	150000	Rukunjaya – Lamteng
2	Bank Niaga	2400000	738459	Brahman – Lamteng Cempaka – Lamteng Lembusari – Lamteng
3	Bank Mandiri	-	300	Makmur – Lamteng
	Jumlah (Rp.000)	2554000	888759	
	(%)	100	34.80	

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Sulawesi Selatan, 2003

Keragaan Pemanfaatan Kredit

Pada Tabel 4, menunjukkan bahwa peternak di Propinsi Lampung rata-rata frekuensi pinjam ke lembaga pembiayaan program dan non program menurun dari 4,4 kali (1993-1997) menjadi 4 kali (1998-2002).. Sementara itu rata-rata frekuensi pinjam dari lembaga pembiayaan melalui program justru meningkat dari 3 kali (1993-1997) menjadi 3,75 kali (1998-2002). Propinsi Sulawesi Selatan, rata-rata jumlah frekuensi pinjam dari peternak menurun dari 1,5 kali (1993-1997) menjadi 1,1 kali (1998-2003). Selain itu, frekuensi pinjaman dominan adalah pada lembaga pembiayaan non program yang meningkat dari 2 kali menjadi 2,3 kali pada tenggang waktu 1998-2002, sedangkan pada. Besarnya nilai pinjaman peternak di Propinsi Lampung senilai Rp 22.5

juta jauh lebih tinggi dari peternak di Propinsi Sulawesi Selatan senilai Rp 2,85 juta.. Pada tahun yang sama peternak di Sulawesi Selatan hanya mampu memperoleh pinjaman dari kredit program senilai Rp 2,8 juta.

Tabel 3. Perkembangan investasi perusahaan peternakan di Lampung Tengah, Tahun 1990 – 2002

No	Tahun	Perusahaan	Bidang Usaha	Investasi	
				Nilai (Rp.000.000)	Status
1.	1990	PT. GGLC	Sapi Potong	8.500	Non Fasilitas
2.	1995	PT. Santosa Agrindo	Sapi Potong	8.500	PMA
3.	1996	PT. Peternakan Desa Indo Jaya	Sapi Potong	3.000	PMA
4.	2000	PT.C.G. C Wala Perkasa	Sapi Potong	3.800	Non Fasilitas

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Lampung, 2003

Tabel 4. Rata-rata frekuensi pinjam, nilai pinjaman dan lama berhubungan peternak dengan lembaga pembiayaan, tahun 1993 – 2003

Lembaga Pembiayaan	Rata-rata frekuensi Pinjam (kali)		Nilai Pinjam ¹⁾ (Rp.000)
	1993 - 1997	1998 – 2003	
A. Lampung			
a. Non Program	5,3	5	16333,3
1. Formal	7	5,7	16333,3
2. Non Formal	2	3	0
b. Program	3	3,75	23638,2
Jumlah (a+b)	4,4	4	22542,5
B. Sulsel			
a. Non Program	2	2,3	0
1. Formal	0	0	0
2. Non Formal	2	2,3	0
b. Program	1	1	2859,3
Jumlah (a+b)	1,5	1,1	2859,3

Sumber : Data Primer, 2003

Keterangan : Nilai pinjaman yang dimasukkan adalah nilai pinjaman selama 1 tahun terakhir (2003)

Praktek Skim Pembiayaan

a. Mekanisme *Delivery*

Pada Tabel 5, memperlihatkan bahwa di Provinsi Lampung rata-rata jarak yang ditempuh peternak untuk mendapatkan modal usaha dari tempat tinggal sampai kesumber pembiayaan mencapai 20,4 kilo meter dan yang terjauh 32,7 kilo meter. Sedangkan untuk mengurus ke lembaga pembiayaan, peternak harus mengunjungi ke lembaga tersebut rata-rata 1,83 kali dengan lama proses pencairan hingga 59 hari hingga 86 hari. Oleh karena itu timbul keinginan peternak yang mengharapkan lamanya

proses pencairan pinjaman dari lembaga pembiayaan non program dan program paling lama 22,6 hari, diantaranya untuk proses pencairan di non program pada lembaga pembiayaan 3 hari lebih cepat. Di Propinsi Sulawesi Selatan, jarak yang ditempuh peternak untuk kurang dari 1 kilo meter, dengan jumlah kunjungan 7,5 kali, lama proses pencairan 213,3 hari. Sementara harapan peternak dalam proses pencairan 67,9 hari. Adanya kesenjangan lama proses pencairan dan jarak yang ditempuh ke sumber pembiayaan, hal ini belum menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan pembiayaan usaha peternakan dan kurangnya koordinasi upaya pelaksanaan menyangkut kegiatan program maupun non program.

Tabel 5. Jarak frekuensi kunjungan, lamanya proses dan proses pencairan yang diinginkan petani ternak pada lembaga pembiayaan tahun 2003

Lembaga Pembiayaan	Jarak (Km)	Jml.Kunjungan (kali)	Lama Proses Pencairan (Hr)	Proses.Pencairan yg diharapkan (Hari)
A. Lampung				
a. Non Program	1,67	2	6,33	3
1. Formal	1,67	2	6,33	3
2. Non Formal	0	0	0	0
b. Program	32,7	1,75	86,25	21,89
Jumlah (a+b)	20,4	1,83	59,67	22,6
B. Sulsel				
a. Non Program	0	0	0	0
1. Formal	0	0	0	0
2. Non Formal	0	0	0	0
b. Program	0,45	7,65	213,33	67,96
Jumlah (a+b)	0,45	7,6	213,33	67,96

Sumber : Data primer. 2003.

b. Seleksi, Insentif dan Enforcement

Adanya sifat kehati-hatian lembaga pembiayaan formal untuk menyalurkan kreditnya, dalam mekanisme kredit non program lebih *rigid* dibanding kredit program yang umumnya berlaku tingkat bunga yang bersubsidi (Sudaryanto dan Syukur, 2000).

Aturan main dari masing-masing lembaga pembiayaan berbeda, utamanya pada lembaga pembiayaan formal yang memberikan insentif berupa IPTW (insentif pembayaran tepat waktu) beserta sanksi bagi peminjam yang kurang menepati aturan main yang ditetapkan.. Sedangkan persyaratan aplikasi yang sangat ketat lebih diberlakukan oleh lembaga pembiayaan formal (Tabel 6 dan 7).

Tabel 6. Persyaratan aplikasi sumber pembiayaan, tahun 2003

Jenis Persyaratan	Lembaga Pembiayaan				
	KKP	PKP	KKPA	Bank Umum	Koperasi
1. Form Aplikasi	V	V	V	V	V
2. Identitas (KTP)	V	V	V	V	V
3. Rekening	-	-	-	V	V
4. NPWP	-	-	-	V	-
5. Persetujuan pasangan (suami/istri)	-	-	-	V	V
6. Bukti Agunan	-	-	-	-	-
- Sertifikat tanah/bangunan	V	-	-	V	-
- BPKB	-	-	-	V	-
- Girik/SPOP	-	-	-	V	-
7. Anggota	V	V	V	-	V
8. RDKK	V	V	V	-	-
9. Surat keterangan desa	V	-	-	V	-
10 Surat Keterangan Usaha	-	-	-	V	-
11. Perjanjian Kredit (Notaris)	-	-	V	V	V
12. SK Pegawai	-	-	-	V	-
13. Keterangan Gaji	-	-	-	V	-
14. Berkelompok	V	V	V	-	-
15. Persetujuan dari Kelompok	V	V	V	-	-

Sumber : Data Primer, 2003

Keterangan : KKP = Kredit Ketahanan Pangan; PKP = Program ketahanan Pangan

KKPA = Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggota

Tabel 7. Jenis insentif dan sanksi menurut lembaga pembiayaan, tahun 2003

Jenis Persyaratan	Formal			Non Formal	
	Kredit Program	Bank Umum	Koperasi	Pedagang output	Saudara/Tetangga
A. Insentif					
1. Bisa pinjam lagi	V	-	V	V	-
2. Hadiah	-	V	-	-	-
3. Pinjam di bawah 1bulan tanpa bunga	-	-	-	V	-
4. Potongan bunga (IPTW)	-	V	-	-	-
5. Bisa dapat kredit program (KKP/PKP)	-	-	-	-	-
	V	V	-	-	-
B. Sanksi					
1. Ditagih terus-menerus	V	V	-	V	V
2. Tidak diberi pinjaman lagi	V	V	V	V	V
3. Agunan ditahan	V	V	-	-	-
4. Tunggakan kena bunga	-	V	-	-	-
5. IPTW hilang	-	V	-	-	-
6. Tdk dpt ambil kredit program	V	-	V	-	-

Sumber : Data primer, 2003

Keterangan : V = insentif yang diberikan dan sanksi yang diberlakukan oleh lembaga pembiayaan ybs

Biaya Transaksi

Biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan peternak sejak pengajuan kredit hingga penyaluran. Biaya transaksi tersebut antara lain untuk transport, administrasi dan potongan-potongan yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Biaya administrasi yang harus dikeluarkan yaitu meterai, foto Copy KTP, keterangan desa, SIUP, kartu pegawai dan lain-lain, dan berupa potongan merupakan prasyarat yang diharuskan oleh lembaga pembiayaan.

Pada Tabel 8, menunjukkan bahwa biaya transaksi yang dikeluarkan oleh peternak rata-rata kurang dari 1 persen terhadap nilai pinjaman yang mereka terima dari non program maupun program atau senilai Rp 185.701 di Provinsi Lampung dan Rp 10.007 di Provinsi Sulawesi Selatan. Diantara seluruh biaya transaksi yang terbesar jumlahnya adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan administrasi 0,55% di Provinsi Lampung dan biaya lainnya mencapai 0,35 persen bagi peternak di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel .8. Prosentase biaya transaksi terhadap nilai pinjaman peternak menurut lembaga pembiayaan tahun 2003

Lembaga Pembiayaan	Nilai pinj (Rp 000)	Bunga (%)	Biaya Transaksi (%)				Jumlah (Rp)
			Transp	Adm	Pot	Lainnya	
A. Lampung							
a. Non rogram	16333.33	22.85	0.03	0.57	0.03	0.31	153533.3
1. Formal	16333.33	22.85	0.03	0.57	0.03	0.31	153533.3
2. Non							
Formal	0	0	0	0	0	0	0.0
b. Program	22766.22	19.46	0.08	0.65	0	0	166193.4
Jumlah (a+b)	21847.24	19.33	0.05	0.55	0.02	0.23	185701.5
B. Sulsel							
a. Non							
Program	0	0	0	0	0	0	0.0
1. Formal	0	0	0	0	0	0	0.0
2. Non							
Formal	0	0	0	0	0	0	0.0
b. Program	2859.26	12.27	0	0	0	0.35	10007.4
Jumlah (a+b)	2859.26	12.27	0	0	0	0.35	10007.4

Sumber : Data primer, 2003.

Persepsi dan Aspirasi Skim Pembiayaan yang Diharapkan

Dari hasil analisis bahwa persepsi peternak terhadap penyaluran kredit yang berasal dari sumber pembiayaan formal berkisar 45 % hingga 77 % persen mengatakan penyaluran kredit lebih cepat dan 60 % lebih menyukai penyaluran kredit program. Dari segi aspirasi peternak terhadap skim yang diharapkan ada sekitar 60 % yang menginginkan kredit dalam bentuk uang tunai. Sementara itu dari segi periode pengembalian kredit, diharapkan dalam bentuk kredit yang sifatnya musiman, dan segi penyaluran kredit, diutamakan melalui Kelompok Tani (KT) dengan alasan mempercayakan kepada KT karena dapat memberikan kepastian penyaluran kredit..

Hal yang sangat memberatkan bagi peternak adalah yang berkaitan dengan jenis agunan yang diberlakukan oleh lembaga pembiayaan formal seperti kepemilikan agunan yang dianggap sangat memberatkan. Dan lebih menginginkan penyesuaian kredit

dengan kemampuan aset yang dimiliki dan dalam bentuk surat yang sah sebagai jaminan, seperti sertifikat, BPKB, surat ijin usaha, surat tanah.

KESIMPULAN

Akses peternak terhadap lembaga pembiayaan melalui non program lebih tinggi dibanding program. Ini berarti bahwa keberadaan non program sangat dibutuhkan untuk meningkatkan usaha peternakan dibanding melalui program yang sifatnya insedential dan keberadaanya kurang menjamin kelangsungan usaha.

Dalam transaksi biaya untuk memperoleh kredit, belum mencerminkan adanya biaya tinggi. Kondisi ini mencerminkan adanya aspek transaksi dan mekanisme pembiayaan telah berjalan dengan baik. Dengan konsekuensi lembaga pembiayaan masih memegang teguh prinsip *scerening* dan menyeleksi calon peminjam untuk mendapatkan calon peminjam yang prospektif.

Secara umum persepsi peternak terhadap sumber pembiayaan, utamanya yang formal perlu peningkatan syarat yang tidak terlalu *rigid*, sehingga mempermudah akses peternak untuk memperoleh kredit yang sesuai dengan tingkat produksi, pola pengembalian menurut kemampuan, jangka waktu sesuai dengan musim produksi dan tingkat pengembalian (bunga) relatif lebih rendah dari tingkat bunga kredit komersial.

Sebagai saran pengembangan pembiayaan yang perlu dilakukan adalah membentuk LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sebagai unit pelayanan kredit yang bekerjasama dengan perbankan yang memperkuat terbentuknya lembaga keuangan mikro di pedesaan.

DAFTAR BACAAN

- Anonim. 2002. Pedoman Umum” Pembentukan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun Anggaran 2002. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Dinas Peternakan Provinsi Lampung. 2002. Laporan Tahunan Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan. Lampung.
- Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan. 2003. Laporan Tahunan Penyaluran Kredit BLM Ternak Sapi. Ujung Pandang.
- Sudaryanto,T. dan M. Syukur. 2000. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Memeo. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Syukur. M. 2002. Kajian Pembiayaan Pertanian Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri di Pedesaan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Pnelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

